

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) gaya kepemimpinan transformasional dalam diri Bupati Rustriningsih, dan 2) transformasi birokrasi yang terjadi di kabupaten Kebumen di bawah kepemimpinan Rustriningsih dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kebumen, tepatnya di birokrasi pemerintahan kabupaten Kebumen. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Rustriningsih mantan Bupati Kebumen dan kepada 4 pejabat di Kabupaten Kebumen yang mengalami masa kepemimpinan Rustriningsih. Mereka ini yaitu kepala Dinas Kehutanan, Asekwilda 2, Sekda, dan Ketua DPRD Kebumen. Data dianalisis dengan melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kepemimpinan transformasional ditandai dengan gagasan atau keputusan Rustriningsih dalam memperbaiki birokrasi pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. *One stop service, e-government, direct mail, Ratih TV, In FM* sebagai radio siaran daerah, dan lelang jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen membuktikan kepemimpinan Rustriningsih yang menonjol. Namun, keputusan tersebut bukan gagasan orisinal dari Rustriningsih karena berbagai keputusan tersebut juga sudah menjadi keputusan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan pemerintah daerah, misalnya *e-government* dan dana pembangunan desa berupa ADD (Alokasi Dana Desa). Kedua, transformasi birokrasi tampak dari kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada publik yaitu masyarakat Kebumen. Dalam merumuskan kepentingan publik, pemerintah daerah bersedia membuka dialog dengan banyak pihak sehingga suatu kebijakan yang diambil pemerintah dapat mewakili atau sesuai dengan aspirasi masyarakat Kebumen. Birokrasi memandang masyarakat sebagai customer yang harus dilayani maksimal. Pelayanan publik menjadi prioritas untuk selalu mendapat perhatian dari masyarakat. Pemerintah kabupaten Kebumen bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan pihak swasta dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Birokrasi pemerintah bekerja dengan menyesuaikan kehendak atau kebutuhan masyarakat dan pasar. Akuntabilitas pemerintah diupayakan melalui reformasi birokrasi. Bupati gencar mengupayakan perwujudan nilai-nilai *good governance* seperti transparansi.

Kata kunci: *Kepemimpinan, reformasi birokrasi*